KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Galang dukungan dengan Kadin: Fahri makin keras tolak rencana peleburan BP Batam
Tanggal : Sabtu, 05 Januari 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

SABTU KLIWON
• 5 JANUARI 2019
• 28 RABIUL AKHIR 1440 H
• 27 BAKDAMULUD 1952

Galang Dukungan Dengan Kadin

Fahri Makin Keras Tolak Rencana Peleburan BP Batam

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah mulai menggalang dukungan untuk menolak keinginan Presiden Jokowi melebur Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam. Kemarin, Fahri bertemu pengurus Kadin dari Kepulauan Riau (Kepri) dan Kota Batam untuk membahas hal itu.

"Kami tadi sudah membahas cukup mendalam. Baik dari aspek politik, hukum, juga ekonomi tentunya. Hasilnya, keputusan ini (peleburan) berbahaya sekali," ucap Fahri usai pertemuan itu, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Fahri menyatakan, pembentukan awal BP Batam adalah untuk membangun otonomi khusus. Harapannya, mampu mempercepat pembangunan industri dan perdagangan nasional.

"Kawasan Batam, yang secara geografis masuk Kepulauan Riau dan berbatasan dengan Singapura, diharapkan akan dapat menyaingi Singapura dalam perdagangan dan industri," jelasnya.

Kalau Pemerintah mau membuat terobosan, sambungnya, harus' yang lebih maju. Yang membuat BP Batam lebih fleksibel. Agar dapat menjadikan Batam sebagai daerah yang solid, terkelola dengan baik, dan mandiri. Bukan malah melebur dengan alasan ada dualisme.

Jika Pemerintah ngotot melakukan keinginannya, kata Fahri, semua aspek akan terganggu. Baik aspek ekonomi, hukum, maupun politik.

Dari sisi ekonomi, kata Fahri, menyangkut investasi yang memerlukan kenyamanan dan kepastian. Para investor ingin melihat produksi mereka stabil dalam jangka panjang.

"Itu yang paling penting. Nanti kita ketahui implikasi dari sinyal dunia usaha ini, kalau negara kita memproduksi ketidakpastian, mereka bisa kabur. Karena itu, Pemerintah jangan mengambil keputusan salah terkait pengelolaan Badan Otorita Batam ini," tuturnya.

Dari sisi hukum, Fahri menyebut ada pelanggaran cukup banyak. Salah satunya terkait Undang-Undang. Pelanggaran itu hanya bisa diatasi apabila Presiden berani mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun, Fahri tidak melihat ada alasan mendesak untuk mengeluarkan Perppu.

"Saya kira itu tidak ada yang darurat. Karena itu, secara hukum tidak ada yang akan memberarkan Presiden menerbitkan Perppu atau memutuskan dengan Perppu," ucapnya.

Secara politik, kata Fahri, peleburan BP Batam sama saja dengan langkah bunuh diri. Sebab, dengan peleburan itu, akan banyak pihak yang mengkritik habis Presiden. Terlebih saat ini tahun politik. Peleburan tersebut akan digunakan penantang untuk menjatuhkan Presiden.

"Ingat, penantang-penantang ini seperti harmau. Dia menunggu kelemahan Pemerintah. Nah, kalau ada kelemahan, ini akan meraka terkam," ujarnya. ■ REN